**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar BelakangPenelitian**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi faktor dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak memungkinkan untuk dapat menenuhi sendiri. Kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan, baik yang bersifat individual maupun antar negara maupun pemerintahan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Ekspor impor antar negara telah menjadi jawaban bagi upaya pemenuhan kebutuhan suatu negara, sehingga akan diperlukan suatu kerjasama perdagangan yang satu sama lain dapat menguntungkan.

Dinamika kehidupan dunia hampir tak kenal batas, sehingga manusia dan barang dengan mudah dapat bergerak dalam waktu yang sangat singkat. Berbagai peristiwa maupun kondisi yang tengah terjadi di suatu negara dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh warga negara berbeda yang ada di seluruh dunia. Warga negara tidak hanya menjadi bagian dari komunitas suatu negara melainkan juga telah menjadi warga negara internasional yang hidup dan berkehidupan dalam suasana global. Isu globalisasi yang telah melanda ke berbagai belahan dunia, tidak saja memberikan kemudahan dalam berbagai kehidupan tetapi juga telah membawa permasalahan yang sangat sulit diatasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, keamanan, maupun aspek lainnya.

Mark Horridge, Glyn Wittwer, dan Kodrat Wibowo[[1]](#footnote-2) menyatakan dengan tegas bahwa globalisasi ini telah menembus batas dan sungguh hukum tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pembatasan yang nyata agar ada kepastian pemberlakuan hukum. Kiri dan kanan masih menjadi sumber masalah yaitu perbatasan, terlebih atas dan bawah yang sama sekali tidak ada kepastian hukum sehingga menjadi biasa untuk pegangan dalam bertindak yang berhubungan dengan perilaku globalisasi ini.

Kondisi demikian dikenal seluruh penjuru dunia dengan istilah globalisasi. Seiring berkembang pesatnya teknologi informasi, komunikasi tak pernah ada hambatan, sehingga globalisasi telah menjadi sarana dalam menyediakan berbagai kemudahan bagi manusia di seluruh dunia. Warga negara dari suatu negara tertentu tidak perlu melangkah jauh atau menyeberangi lautan untuk bertemu dan berbicara dengan warga negara lainnya, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, maupun kepentingan lainnya. Berbagai peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia atau berbagai bentuk lain di dunia, dapat mengakses informasi secara *real time*. Kesulitan, hambatan dan tantangan tak akan ditemui lagi ketika seseorang di suatu Negara ingin mentransfer sejumlah uang kepada orang lain di berbagai negara di seluruh dunia. Keamanan terjamin, sehingga dalam waktu singkat dapat sampai serta diterima dengan mudah oleh seseorang yang menjadi tujuan. Sutana Kartadihardja[[2]](#footnote-3)menyebutkan bahwa “Namun tidak hanya sampai dikisaran yang mudah dan cepat, tetapi pemeliharaan dan perbaikan harus diperhatikan. Globalisasi telah menawarkan berbagai inovasi peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Kendati globalisasi dapat memberikan jaminan kemudahan, kecepatan, kehematan, dan murah, tetapi globalisasi tak hanya memiliki berbagai keindahan dan kecerdasan, karena disaat bersamaan itu pula globalisasi menyuguhkan dampak yang membahayakan. Kemudahan yang ditawarkan globalisasi akan semakin memberikan kemudahan dan memfasilitasi kegiatan ilegal yang terjadi dengan melintasi batas-batas yuridiksi negara.

Berbagai permasalahan yang dihadapi setiap negara semakin beraneka ragam dan kompleks, karena satu sama lain permasalahan akan berkaitan. Perekonomian, pendidikan, perpolitikan, keamanan, kesehatan, serta berbagai permasalahan lainnya yang secara terus menerus tidak mengalami reda dari isu kehidupan internasional. Sejumlah isu yang dihadapi setiap negara di dunia internasional adalah isu ekonomi yang paling menjadi pusat perhatian internasional yang bersifat khusus. Pasang surut kerjasama diantara dua negara lebih banyak disebabkan ekonomi, sebagaimana dikemukakan Arry Bainus[[3]](#footnote-4) yaitu “Ekonomi akan selalu menjadi peran dalam kerjasama diantara dua negara, karena menyangkut kepentingan yang bersifat khusus dari setiap negara.Ekonomi jadi pusat perhatian sangat wajar, karena tugas negara yang paling utama adalah mensejahterakan rakyatnya.”

Ekonomi suatu negara tidak terbatas pada lingkup negara, melainkan harus dilakukan dengan kerjasama antara negara. Kemudian ekonomi juka tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa, melainkan menyangkut transaksi ekonomi diantara satu negara dengan negara mitranya. Arry Bainus[[4]](#footnote-5) menyatakan “Tidak ada satu negara yang bisa berkembangan tanpa kerjasama dengan negara lain, terutama dalam bidang perekomian, karena produk suatu negara akan dibutuhkan oleh negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan negara akan dibutuhkan kerjasama ekonomi, karena tidak ada satu negara pun yang mempu memenuhi sendiri untuk kebutuhannya”. Kebutuhan negara yang semakin kompleks, telah menuntut negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Transaksi kerjasama ekonomi diantara dua negara akan sering terjadi, baik negara tetangga, negara dalam satu kawasan maupun negara yang ada di kawasan lain. Kerjasama akan terjadi sangat tergantung dari kebutuhan negara.

Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Australia telah berlangsung dalam berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, keamanan, dan kerjasama lainnya. Kerjasama tersebut dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Australia. Sekalipun dalam perkembangannya tidak terlepas dari pasang surut dari segi keharmonisannya, karena merasa kerugian diantara dua negara akan terjadi, baik secara material maupun moral.

Fenomena hubungan antara Indonesia dengan Australia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sejumlah literatur sejarah telah mengungkapkan dan secara rinci ditulis N. Keyfitz[[5]](#footnote-6) bahwa sejak tahun 1650 para nelayan Bugis dan Makasar secara teratur berlayar ke perairan Australia sebelah utara. Pelayaran tersebut dimulai pada masa Kerajaan Gowa di Makasar tahun 1950an. Pelaut Makassar dan Bugis menyebut Tanah Arnhem dengan sebutan *Marege* dan bagian daerah barat laut Australia disebut *Kayu Jawa.* Pelaut Bugis dan Makasar yang datang ke Australia bertujuan untuk mencari ikan yang akan dibawa ke Indonesia untuk di jual kembali atau diekspor ke negara lain. Dikala itu orang Aborijin telah banyak yang bekerja dan ikut berlayar bersama nelayan tradisional Indonesia saat itu. Orang Aborijin mempelajari dan mengikuti beberapa kebiasaan nelayan tradisional Indonesia, seperti cara mengisap tembakau dan menggambar perahu. Hingga kini masih banyak nelayan tradisional Indonesia yang mencari ikan disekitar perairan Australia. Kendati demikian, lebih lajut dijelaskan Anonim[[6]](#footnote-7) bahwa hubungan negara bertetangga antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut, karena dipicu sejumlah permasalahan seperti tahun 1999 masalah Timor Timur pada 1999, tahun 2012 peristiwa bom Bali dan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia. Kondisi demikian telah berdampak kepada keharmonisan hubungan kerjasama perdagangan Indonesia-Australia yang terganggu. Hubungan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Australia dalam bentuk kerjasama bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, transportasi, pariwisata dan lainnya semakin melemah.

Pengakuan Richard Hauval[[7]](#footnote-8) terhadap Indonesia diungkapkan bahwa Indonesia menduduki peran penting bagi Australia, karena Indonesia memiliki penduduk sangat banyak, sehingga sangat menentukan bagi pasar produk Australia. Kemudian secara geografis sangat berdekatan. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN, sehingga sangat mementukan karena dapat menjembatani hubungan perdagangan Australia dengan negara-negara Anggota ASEAN. Sekalipun Indonesia hanya berada pada posisi ke-11 mitra dagangAustralia, tetapi Indonesia merupakan negara ASEAN terbesar dari segi jumlah populasi dan luas wilayah sehingga dapat menjadi pangsa pasar yang sangat prospek bagi perdagangan Australia.

Bambang Cipto[[8]](#footnote-9) mengemukakan bahwa bentuk hubungan Indonesia-Australia terlihat dari Australia memberikan bantuan dalam bidang pendidikan bagi Indonesia dalam jumlah cukup besar. Hal tersebut ditandai dengan setiap tahun pemerintah Australia memberikan bantuan lebih dari 250-300 mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi pada jenjang S2 dan S3 di Australia. Demikian pula dalam memberikan bantuan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan untuk beberapa wilayah di Indonesia. Kerelaan penyerahan bantuan Australia ke Indonesia merupakan bukti nyata bahwa Indonesia memegang peranan penting bagi Australia. Lebih jelas ditegaskan Richard Chauvel dkk.[[9]](#footnote-10)Bahwa hubungan Indonesia-Australia selalu penting. Posisi strategis Indonesia menjembatani rute perdagangan Australia dengan negara-negara ASEAN. Populasi dan posisi Indonesia di Asia Tenggara menyebabkan pembangunan kemitraan bilateralnya patut untuk diperhitungkan. Kerjasama telah berkembang, baik dalam bidang ekonomi, teknis, pendidikan dan budaya yang luas. Indonesia dan Australia sepakat untuk membuka lebar hubungan kerjasama bilateral kedua negara, baik dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, maupun pembangunan. Kehadiran *Free Trade Agreement* (FTA) antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand telah membuat jalan dalam usaha peningkatan dan penguatan hubungan bilateral perdagangan antara Indonesia dan Australia dalam kerangka FTA bilateral. Kerangka FTA bilateral Indonesia-Australia dapat meningkatkan peluang kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara, baik melalui peningkatan proyek kerjasama ekonomi maupun untuk membuka pasar potensial kedua negara. Keberadaan FTA bilateral Indonesia dan Australia diharapkan dapat melahirkan kemampuan dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral mengingat komplementritas kedua negara dan keberdekatannya.

Kerjasama perdagangan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat merupakan aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga Indonesia telah telah menaruh perhatian besar terhadap pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat. Daging sapi merupakan gizi yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi keharusan negara untuk memenuhi kebutuhan daging sapi. Indonesia menyadari bahwa secara nasional sudah tidak mungkin memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan Australia yang memiliki kemampuan untuk memebuhi kebutuhan Indonesia.

Keharmonisan hubungan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Australia menurut Anonim[[10]](#footnote-11)disebutkan bahwa tahun 2010 Australia dan Indonesia telah mengadakan kesepakatan *agreement.*Bentuk kerjasama bidang ekonomi Indonesia-Australia diantaranya adalah kerjasama perdagangan Australia-Indonesia bidang ekspor impor daging sapi. Realisasi dari kerjasama tersebut dilakukan untuk penyediaan daging sapi secara nasional di Indonesia, sehingga negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kerjasama tersebut harus dilakukan, karena perbadingan kuantitas permintaan daging sapi dalam negeri dengan jauh dari kemampuan untuk memenuhinya. Solusi terbaik dan menguntungkan bagi Indonesia dan Australia adalah harus ditempuh dengan melakukan kesepakatan kerjasama ekspor impor daging sapi.

Upaya pemerintah Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi dengan cara membeli daging sapi dari luar negeri yakni sapi Australia merupakan alternatif terbaik. Sekalipun menujukkan bahwa Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mandiri dalam penyediaan kebutuhan daging sapi nasional. Bustanul Arifin[[11]](#footnote-12) menyebutkan bahwa Indonesia baru mampu memproduksi 70% dari kebutuhan daging sapi nasional dimana 30% kebutuhan lainnya dipenuhi melalui impor.

Berdasarkan hasil penelitian Sri Edi Swasono[[12]](#footnote-13) tahun 2012, Australia merupakan sumber dari 90,06% impor sapi hidup dan 46,70% impor daging sapi dan jeroan. Selandia Baru merupakan sumber impor 32,52 % daging sapi dan jeroan. Kini Indonesia menjadikan Australia sebagai sumber impor ternak sapi dan daging sapi yang jumlahnya cukup besar. Besaran impor tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kesejahteraan dan pertambahan penduduk. Faktor lain yang lebih besar yaitu dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani. Bahkan bagi Umat Islam, sapi merupakan hewan sarana ibadah, sehingga peningkatan jumlah kebutuhan sapi akan meningkat dalam pada waktu tertentu di setiap tahun.

Sejalan dengan impor sapi sangat penting, maka Indonesia menggunakan sistem *country based*,yang artinya impor hanya bisa dilakukan dari suatu negara. Impor daging sapi bagi Indonesia, tidak terlepas dari persyaratan tertentu, sehingga daging sapi impor harus didatangkan dari negara yang terbebas dari berbagai bentuk penyakit, baik penyakit mulut, kuku, maupun penyakit lainnya. Berdasarkan standar penilaian sistem *country based* tersebut, maka negara yang menjadi alternatif adalah Australia.

Berdasarkan hasil penelitian TriyadiHarist[[13]](#footnote-14) disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara pengimpor terbesar sapi hidup Australia. Sepanjang 2008 sebanyak 651.196 ekor atau 75% dari 869.545 ekor ekspor sapi hidup Australia yang dijual ke pasar dunia di ekspor ke Indonesia. Impor Indonesia sepanjang 2008 itu naik 26 persen dari impornya pada tahun 2007 yang mencapai 516.992 ekor. Total nilai impor Indonesia mencapai 419 juta dolar Australia. *Meat & Livestocks Australia* (MLA), perusahaan yang menjadi mitra industri peternakan dan pemerintah Australia, menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan ekspor dan mitra dagang yang penting. Selanjutnya Chalib Thalib dan Yudi Guntara Noor[[14]](#footnote-15) menjelaskan bahwa bahwa *Meat Live Stock Australia* tahun 2011 menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2010, Indonesia telah mengimpor 520. 987 ekor sapi bakalan dari Australia. Hal tersebut terdapat penurunan sekitar 33% dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009 yang mencapai 772.000 ekor. Penurunan jumlah impor sapi tersebut seiring dengan pencapaian target swasembada daging sapi tahun 2014.

Beberapa negara selain dari Australia dan Selandia Baru yang bisa menjadi mitra Indonesia dalam ekspor-impor sapi. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia menganut system *Country Based* bukan *Zona Based* yang artinya harus impor daging dan sapi hidup dari negara-negara yang telah bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dikutip dari *World Organisation forAnimal Health* (OIE) setidaknya ada 66 negara termasuk Indonesia dan Australia yang memberlakukan aturan *country based* atau bebas dari PMK Alasan khusus memilih Australia sebagai negara alternatif pemasok sapi karena jarak kedua negara sangat dekat dengan Indonesia, hasil perhitungan seperti lama perjalanan, jumlah pasokan sapi, serta dan aspek kehalalan khusus untuk daging sapi beku. Impor sapi hidup dari negara lain(selain Australia dan Selandia Baru)dipandang tidak ekonomis, karena biaya transportasi mahal dan lama perjalanan yang dapat merubuhkan kondisi fisik sapi. Menurut Atien Priyati[[15]](#footnote-16) menyatakan bahwa kapasitas pasokan sapi negara lain juga terbatas. Sebenarnya Brazil dan India merupakan negara yang memiliki pasokan sapi cukup besar dan harga jauh lebih murah dibanding sapi Australia. Namun kedua negara tersebut tidak termasuk dalam daftar negara-negara *Country Based*.

Impor sapi Australia ke Indonesia mengalami kondisi yang fluktuatif dari masa ke masa. Kendati, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan daging sapi nasional sampai belum mampu terpenuhi, sehingga masih harus ditutupi dengan keberadaan sapi impor, baik dalam bentuk sapi bakalan maupun daging sapi beku. Jika hanya mengandalkan daging sapi dari peternak lokal, maka akan menghadapi adalah daging sapi semakin tinggi dan langka karena ketersediaan masih kurang dibandingkan tingginya permintaan daging sapi. Dampak nyatanya adalah akan menjadi harga mahal dan tidak terjangkau masyarakat banyak.

Kepentingan nasional suatu negara tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi dirinya sendiri, karena tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Bersamaan dengan itu tingkat sensitifitas terhadap perkembangan internasional semakin tinggi sebagai dampak dari sistem teknologi komunikasi internasional yang terbuka tanpa batas. Perubahan dan perpindahan tempat bagi manusia, barang dan kafital antar negara semakin mudah dan cepat bereaksi aktif tanpa hambatan. Kondisi demikian telah membuka peluang bagi setiap negara untuk melakukan kerjasama dalam rangka memenuhi kepentingan negara. Tidak hanya sisi positif yang akan diperoleh atas keterbukaan tersebut, melainkan sisi negatifnya akan rentan terjadi, karena keterkaitan kepentingan dan faktor dengan perkembangan internasional atau global akan menyebabkan timbul peristiwa konflik kepentingan.

Sistem perdagangan internasional yang sangat mungkin terbentuk, tidak lagi didasarkan atas konsep kedaulatan nasional yang sempit dan kaku. Tetapi ada kemungkinan besar akan dibentuk permasalahan transnasional, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Terutama yang prospek dapat memberi keuntungan bagi kehidupan warga negaranya masing-,masing. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan memudahkan pula bagi tindakan negatif untuk mendapat keuntungan sepihak. J.B. Kristiadi[[16]](#footnote-17) menyatakan bahwa Sejumlah aktor yang terlibat di dalam sistem internasional juga makin bervariasi yang mencakup aktor negara (*state actor*) dan aktor bukan negara (*non state actor*). Konflik yang mungkin muncul juga bersifat nyata antara yang kuat dan lemah. Kecenderungan kuat bahwa konflik yang akan terjadi tidak hanya konflik antar negara (*between states*), melainkan konflik antar negara dengan *non state actor* yang kemudian mempengaruhi hubungan antar negara. Dalam kontek ini, perdagangan internasional dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti ekspor impor daging sapi akan menjadi isu dominan hubungan internasional.

Daging sapi merupakan produk yang diperdagangkan di pasar internasional. Permintaan daging sapi di Indonesia secara terus meningkat, karena produksi dan konsumsi terus membesar di dunia. Akibatnya kenaikan harga daging sapi di pasar domestik terus meningkat. Achmad Firman menyebutkan bahwa bagi negara importir, kondisi harga daging sapi di pasar internasional yang cenderung turun tidak mampu menekan kenaikan harga di pasar domestik. Bagi konsumen pendapatan tinggi, kenaikan harga tersebut tidak jadi masalah, namun kenaikan harga daging sapi dapat berdampak pada kenaikan harga daging dan telur ayam. Sekalipun diketahui bahwa selama ini daging dan telur ayam merupakan bahan pangan bergizi dengan harga relatif murah. Jika harga daging dan telur ayam ikut serta naik, maka dapat mengancam ketahanan pangan, sehingga dipandang perlu dengan segera untuk melakukan pengendalian harga daging.

Kerjasama perdangangan Indonesia-Australia yang berkaitan dengan pangan telah berlangsung sejak lama. Kerjasama berawal dari penduduk pemukiman Eropa pertama di Australia yang bergantung pada persediaan makanan. Persediaan makanan yang sering kali dibawa dari Jawa.Kapal pertama yang datang di Sydney dari Indonesia adalah kapal Waaksamheyd pada tahun 1790. Kapal itu membawa persediaan makanan dari Batavia (nama Jakarta pada saat itu). Persediaan makanan itu mencakup: 171 ton daging sapi, 172 ton daging babi, 39 ton tepung, 4.500 kg gula, 31.000 kg beras.[[17]](#footnote-18) Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang dapat mengganggu terhadap keharmonisan kerjasama tersebut. Hal tersebut ditandai dengan pada tahun 2013 terdapat pengurangan kuota impor daging sapi yang berdampak pengurangan pemenuhan kebutuhan daging sapi di Indonesia, sehingga stabilitas perekonomian Indonesia terganggu. Perkembangan kepentingan yang satu sama lain berbeda, maka pada gilirannya terjadi perbedaan paham. Dampak dari kenyataan demikian, maka hubungan yang berkaitan dengan impor daging sapi terganggu keharmonisan kerjasama perdagangan, bahkan sempat terjadi pengurangan kuota impor daging sapi.

Ditengah-tengah perjalanan kerjasama perdagangan intensif dan harmonis antara Indonesia dengan Australia, tetapi tidak terlepas dari aspek lain yang dapat mempengaruhinya. Hal tersebut ditandai dengan kenyataan bahwa pada tahun 2013 sempat ada pengurangan impor sapi dari Australia. Kuota impor sapi dari Australia yang diizinkan pemerintah Indonesia merosot tajam yaitu dari 250.000 ekor pada kuartal pertama 2013 menjadi 50.000 ekor untuk periode Juli sampai September 2013.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengungkapkannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Pengurangan Kuota Impor Daging Sapi Australia dan Pengaruhnya Terhadap Kerjasama Perdagangan Kedua Negara.

**B. Identifikasi Masalah**

Untuk kemudahan dalam memahami materi yang diungkapkan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang impor daging sapi?
2. Bagaimana hubungan kerjasama perdagangan Indonesia - Australia?
3. Sejauhmana pengaruh pengurangan kuota impor daging sapi terhadap hubungan kerjasama perdagangan Indonesia-Australia?

**1. Pembatasan Masalah**

Sejalan latar belakang di atas, penulis memberikan batasan bahasan pada kerjasama perdagangan Australia-Indonesia mengenai pengurangan sementara impor daging sapi pada tahun 2012-2014. Batasan tahun digunakan, karena penulis ingin fokus dalam menjelaskan mengenai pengaruhnya terhadap hubungan kerjasama perdagangan yang ada kaitannya dengan impor daging sapi Australia.

1. **Rumusan Masalah**

Adapun yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Sejauhmana pengurangan kuota impor daging sapi Autralia dan pengaruhnya terhadap hubungan kerjasama perdagangan kedua negara?.

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan, secara garis besar bertujuan sebagai berikut:

1.Mengetahui kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang impor daging sapi.

2.Mengetahui hubungan kerjasama perdagangan Indonesia – Autraslia.

3.Mengetahui pengaruh pengurangan kuota impor daging sapi terhadap hubungan kerjasama perdagangam Indonesia-Australia.

**2. Kegunaan Penelitiaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, baik dosen, peneliti, pengamat maupun dan mahasiswa dalam mengkaji Hubungan Kerjasama Perdagangan Indonesia-Australia dalam bidang impor daging sapi.

2. Bahan tambahan informasi, pembelajaran dan pertimbangan bagi peneliti dan pengkaji Ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam kajian kerjasama perdagangan antara 2 (dua) negara yaitu Indonesia dengan Australia.

**D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

**1. Kerangka Teoritis**

Kerjasama internasional dalam kehidupan bernegara merupakan keniscayaan yang harus dilakukan, karena setiap negara tidak mungkin mampu mencapai tujuannya tanpa disertai kerjasama dengan negara lain.Huala Adolf[[18]](#footnote-19) menyatakan bahwa “Negara sebagai subjek hukum internasional, untuk menjadi subjek hukum internasional, pemerintah negara yang bersangkutan harus mempunyai kemampuan melakukan hubungan internasional dengan negara lain.”Indonesia sebagai negara berdaulat dan telah mendapat pengakuan internasional.

Hubungan kerjasama perdagangan daging sapi Indonesia dan Australia telah menjadi kebutuhan, sehingga akan memerlukan konsep dan teori tertentu yang tepat untuk menganalisisnya. Teori yang digunakan untuk menganalisis tersebut adalah teori kerjasama internasional. Hal tersebut dianggap tepat karena semua negara tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri sehingga perlu bekerja sama dengan Negara lain.

Kerjasama internasional dijelaskan Koesnadi Kartasasmita[[19]](#footnote-20)yaitu: “Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional”. Kerjasama internasional dengan hubungan internasional memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana menurut pendapat Yuda Bhakti[[20]](#footnote-21)bahwa “Kerjasama internasional merupakan hasil atau wujud nyata dari hubungan internasional, karena tidak ada kerjasama internasional tanpa hubungan internasional, sebaliknya tidak ada hubungan internasional tanpa kerjasama internasional.” Bentuk kerjasama internasional dalam konteks hubungan internasional terbagi menjadi kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang-bidang tertentu. Kerjasama tersebut berprinsip saling menguntungkan,saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah dalam pengambilan kebijakan di negaranya masing-masing. Kemudian yang dimaksud dengan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau beberapa negara.

Hubungan kerjasama internasional Indonesia-Australia merupakan bentuk nyata hubungan bilateral. Didi Krisna[[21]](#footnote-22)menyatakan bahwa “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara”. Kemudian menurut Sukarwarsini Djelantik[[22]](#footnote-23) mendefinisikan hubungan bilateral yaitu “Hubungan bilateral sebagai hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan memberikan nilai tambahan yang menguntungkan dari hubungan bilateral itu.” Sejalan dengan definisi tersebut, maka hubungan bilateral memiliki beberapa kelebihan antara lain kerjasama tersebut cenderung mudah dilakukan karena negara yang terlibat hanya dua dan aturannya tidak terlalu ketat dan kompleks. Dampak dari kerjasama bilateral pada umumnya membuahkan hasil transaksi yang berulang-ulang melalui aktivitas perdagangan dan investasi.

Kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang perdagangan impor daging sapi ke Indonesia sebagai bentuk nyata dari praktek kerjasama internasional dalam bentuk perdagangan internasional. Maksud perdagangan internasional menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra[[23]](#footnote-24) yaitu “Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang atau jasa yang melintasi batas negara.”Dalam perdagangan internasional dikenal beberapa teori diantaranya teori keunggulan absolute Adam Smith dan teori keunggulan komparatif David Ricardo.Menurut Anonim[[24]](#footnote-25)teori keunggulan Absolut yang dikemukakan oleh Adam smithbahwa “Suatu negara akan melakukan perdagangan jika kedua negara tersebut memperoleh keuntungan”. Adam Smith[[25]](#footnote-26) juga mengemukakan sebagai betikut :

*It was impossible for all nations to become rich simultaneously byfollowing mercantilist prescriptions because the export of one nationis another nation’s import. However, all nations would gainsimultaneously if they practiced free trade and specialized inaccordance with their absolute advantage.*

Kemudian menurut Adam Smith mengemukakan Reinhard Schumacher[[26]](#footnote-27)bahwa *“If a foreign country cansupply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it ofthem with some part of the produce of our own industry employed in a way in whichwe have some advantage”.* Menurut Smith suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa perunit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara-negara lain.

Teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua jenis komoditas jika dibandingkan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung, selama rasio harga antar negara masih berbeda jika dibandingkan tidak ada perdagangan. David Ricardo (1817*) wasconcerned with the static resource allocation problem when he defined the concept ofcomparative advantage, which is determined not by absolute values of labor productivity but by labor productivity[[27]](#footnote-28).* Keunggulan komparatif hanya bisa terjadi jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih efisien dari pada orang lain. Suatu negara cenderung untuk mengeskpor barang-barang tertentu yang diproduksi secara efisien dan mengimpor untuk barang yang mereka tidak bisa produksi secara efisien. Selanjutnya, teori Heckscher Ohlin tentang pola perdagangan menyatakan bahwa Komoditas-komoditas yang dalam produksinya memerlukan faktor produksi (yang melimpah) dan faktor produksi (yang langka) di ekspor untuk ditukar dengan barang-barang yang membutuhkan faktor produksi dalam proporsi yang sebaliknya. Jadi secara tidak langsung faktor produksi yang melimpah di ekspor dan faktor yang langka diimpor.[[28]](#footnote-29)Ekspor merupakan bagian penting dalam perdagangan internasional. Ekspor dapat diartikan sebagai total penjualan barang yang dapat dihasilkan oleh suatu negara, kemudian diperdagangkan kepada negara lain dengan tujuan mendapatkan devisa. Suatu negara dapat mengekspor barang-barang yang dihasilkannya ke Negara lain yang tidak menghasilkan barang-barang yang dihasilkan negara pengekspor.[[29]](#footnote-30)

Secara praktis disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan bahwa yang dimaksud dengan ekspor adalah “mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean, sedangkan impor adalah memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah pabean”.[[30]](#footnote-31)Dalam transaksi perdagangan ekspor, maka eksportir banyak berhubungan dengan berbagai instansi/lembaga yang menunjang terlaksananya transaksi ekspor. Hubungan kerjasama Indonesia-Australia dalam impor daging sapi merupakan praktek dari hubungan internasional yang tidak terlepas dari kemungkinan terjadi keretakan yang disebabkan oleh aspek lain yang kurang mendukung karena kepentingan ke dua negara yang berbeda.

Sejalan dengan dasar teoritis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diasumsikan sebagai berikut:

1. Kerjasama antara negara merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
2. Ekspor impor antar negara merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap Negara dalam menenuhi kebutuhan yang tidak dimiliki negara tersebut.
3. Kerjasama perdagangan telah menjadi suatu kebutuhan dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan melalui ekspor impor.
4. **Hipotesis**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan dasar teoritis telah diungkapkan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

“Jika ada pengurangan kuota impor daging sapi Australia, maka dapat berpengaruh terhadap hubungan kerjasama perdagangan kedua negara.”

1. Pegurangan impor daging sapi Australia akan berdampak pada ketidakstabilan harga daging sapi di Indonesia.
2. Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan Australia untuk melalukan impor daging sapi, baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Hubungan kerjasama perdagangan tergangu, sehingga terpaksa harus mengurangi keuntungan dari hasil kerjasama tersebut.
4. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Secara operasional, penelitian ini dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 1.1. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi** |
| Variabel Bebas:Pengurangan kuota impor daging sapi dari Australia | 1. Perubahan kuota impor daging sapi dari Australia untuk Indonesia.
2. Permintaan Australia tidak dapat dipenuhi oleh Indonesia.
 | 1. Data (fakta dan angka) menunjukkan ketidaksesuaian jumlah kuota dengan impor.
2. Data (fakta dan angka) permintaan Australia yang tidak dipenuhi Indonesia.
 |
| Variabel Terikat:Hubungan kerjasama perdagangan keduanegara Terganggu. | 1. Pengurangan keuntungan perdagangan.
2. Persediaan kebutuhan terbatas.
 | 1. Kelangkaan daging sapi di Indonesia.
2. Harga daging sapi mahal.
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Sejalan dengan dasar teoritis yang telah diuraikan diatas, maka dapat digambarkan alur pemikiran mengenai kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang ekspor impor daging sapi sebagaimana pada skema berikut.

Australia

Indonesia

Kerjasama Perdagangan

(Ekspor-Impor Daging Sapi)

 Ekspor Daging Sapi

Kerjasama

Perdagangan

Australia

Dampak Di Indonesia

* Kelangkaan daging sapi
* Harga daging sapi mahal dan tidak terjangkau pembeli
* Pegadang daging sapi mogok dagang
* Keuntungan hasil perdagangan berkurang.
* Persediaan daging sapi berkurang

Pengurangan kuota daging sapi

Gambar: 1.1. Pengurangan Kuota Impor Daging Sapi Australia dan Pengaruhnya

Terhadap Kerjasama Perdagangan Kedua Negara.

**E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**1.Tingkat Analisis**

Teknik analisis data dalam penelitian ini kualitatif yaitu menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang impor daging sapi melalui data yang didapatkan. Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan politik, hukum, maupun ekonomi disesuaikan dengan kebutuhan selama yang berhubungan dengan obyek penelitian penelitian yaitu mengenai penghentian beberapa bentuk kerjasama Indonesia Australia dalam bidang ekspor impor daging sapi dan pengaruhnya terhadap kerjasama kedua negara.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik. Analisis deskritif digunakan untuk menggambarkan mengenai implementasi kebijakan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Australia dalam bidang impor daging sapi. Kemudian dijelaskan mengenai pengaruhnya atas gangguan kerjasama impor daging sapi Indonesia-Australia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data adalah telah pustaka *(library research)* yaitu dengan cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berasal dari buku,jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, artikel dan sebagainya. Penelusuran literature akan dilakukan memperoleh data dari perpustakaan maupun lembaga terkait yang terdiri dari:

1. Kementerian Perdagangan Indonesia

2. Kementerian Luar Negeri Indonesia

3. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

4. Kedutaan Besar Australia

5. Biro Pusat Statistik Indonesia

6. Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan Ilmu Hubungan Internasional)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, internet, maupun buletin yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti yakni mengenai kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang Impor daging sapi. Beberapa data yang akan digunakan di antaranya:

a. Perjanjian perdagangan Indonesia dan Australia

b. Data ekspor impor Indonesia dan Australia

c. Kebijakan Pemerintah Australia dalam bidang perdagangan Internasional.

d. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang perdagangan Internasional.

**F.Lokasi dan Lama Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dibeberapa tempat yang berhubungan dengan kebutuhan data objek penelitian diantaranya adalah Kementerian Perdagangan Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kedutaan Besar Australia, Biro Pusat Statistik Indonesia, Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan Ilmu Hubungan Internasional), serta tempat lain yang dibutuhkan. Kemudian penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan yaitu mulai September sampai dengan Nopember 2015

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan dan pemahaman materi bahasan, maka penulisan hasil peneltian ini dilakukan pembagian dalam lima bab dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah yang meliputi pembatasan masalah dan perumusan masalah. Kemudian menjelaskan juga mengenai tujuan dan kegunaan penelitian. Kerangka pemikiran dan hipotesis yang meliputi kerangka teoritis dan hipotesis, operasionalisasi variabel dan indikator (konsep teoritik, empirik, dan analisis) serta skema kerangka teoritis. Metode penelitian meliputi tingkat analisis, metode penelitioan, dan teknik pengumpulan data. Lokasi dan lamanya penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua memuat dasar teoritis mengenai hubungan bilateral, perdagangan internasional, dan ekspor impor.

Bab ketiga menyajikan mengenai hubungan bilateral Indonesia Australia yang meliputi sejarah perkembangan hubungan Indonesia Australia, kerjasama perdagangan Indonesia Australia, dan kerjasama perdagangan bidang ekspor impor daging sapi Indonesia-Australia.

Bab keempat merupakan bab pembahasan mengenai kerjasama Indonesia Australia bidang ekspor impor daging sapi dengan membahas tentang kebijakan Indonesia dalam bidang impor daging sapi, kebijakan Australia bidang ekspor daging sapi, serta kerjasama perdagangan Indonesia Australia.

Bab kelima adalah bab penutupan yang memuat mengenai kesimpuan dan saran.

1. Mark Horridge, Glyn Wittwer, dan Kodrat Wibowo. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora.Sosiohumaniora.*Dampak Imfor Beras Nasional Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Model CGE INDOTREM*. Vol. 18, Nomor 3, Tahun XI Nopember 2009, ISSN 1511-0916 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sutana Kartadihardja. 2008. *Refleksi Negara Republik Indonesia Dalam Membina Budaya Bangsa Menghadapi Pengaruh Asing.Suatu Analisis dari Kenyataan*. Yogyakarta: FISIP Press. Hal. 109 [↑](#footnote-ref-3)
3. Arry Bainus. Integrasi Bangsa: Ancaman Disintegrasi (Konflik Vertikal dan Horizontal) dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Seminar dan Lokakarya tentang “Diplomasi dan Integrasi Bangsa.Diselenggarakan Kamis 10 April 2014 di RSG Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran.Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung. Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
5. N. Keyfitz. The Cohort In The Indonesia-Australian Communication. Masyarakat Indonesia.Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia.April 2011 Jilid IV No. 2.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. ISSN 0125-9989.Hal. 97-109. [↑](#footnote-ref-6)
6. Anonim, *Geografi Australia,* Jakarta, Lembaga Penerbit Indonesia Australia, 1997, hal 175-177 [↑](#footnote-ref-7)
7. Richard Chauvel dkk, *Indonesia-Australia Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral.*Jakarta, Granit, 2005, hal. 6-12 [↑](#footnote-ref-8)
8. Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010,hal. 192. [↑](#footnote-ref-9)
9. Op. Cit. Ricard Chauvel dkk.Hal. 16 [↑](#footnote-ref-10)
10. Anonim, Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Bilateral Indonesia – Australia Dalam Kerangka *Economic Partnership*, *Buletin Kerjasama Perdagangan Internasional*, Edisi 3, 2010, hal. 14-15. [↑](#footnote-ref-11)
11. Bustanul Arifin. Indonesia dan Kebutuhan Daging. Harian Umum Kompas. Rabu 7 Novenber 2012.Hal.14 dan 21. [↑](#footnote-ref-12)
12. Sri Edi Swasono. Restrukturisasi, Keadilan Sosial, dan Globaliasai.Seminar Nasional “Format Ekonomi Indonesia pada Era Mileniujm ke-3”. PT. Telkom dan Universitas Indonesia. Jakarta: 21-22 Maret 2012. Hal. 2-3. [↑](#footnote-ref-13)
13. Triyadi Harist..Kemandirian Pangan dan Peternakan Pola Pengemukan.Hemat Waktu dan Biaya.Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik.Vol. 5 Nomor 11 Tahun III/2013.ISBN 0177-5197.Hal. 72. Jakarta: Badan Informasi Teknologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. . [↑](#footnote-ref-14)
14. Chalib Thalib dan Yudi Guntara Noor, Penyediaan Daging Sapi Nasional Dalam Ketahanan Pangan Indosesia, Bogor.Pusat Penelitian dan Pengembangan Petenakan, 2008, hal. 45 [↑](#footnote-ref-15)
15. Atien Priyanti. IGAP Mahendri, dan Uka Kusnadi, Dinamika Produksi Daging Sapi di Wilayah Sentra Usaha Sapi Potong Indonesia.Bogor, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan*, 2011, hal.574. [↑](#footnote-ref-16)
16. J.B. Kristiadi. *Tekanan Global dan Keamanan Negara ASEAN*.Jurnal Ilmiah: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Edisi XIX Tahun IV Nomor 017, Tahun 2009.Jakarta 2009. Hal.84. [↑](#footnote-ref-17)
17. Geografi Australia.Hubunganantara Australia danIndonesia.

http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html, diakses 10 September 2014. Pukul 16.45. [↑](#footnote-ref-18)
18. Huala Adolf. Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006. Hal. 3. [↑](#footnote-ref-19)
19. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi llmu Administrasi, Bandung, 2001, hal. 23 [↑](#footnote-ref-20)
20. Yudha Bhakti Ardiwisastra.Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing. Bandung. Alumni. 2009. Hal. 109 [↑](#footnote-ref-21)
21. Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*. Seri Revisi I. Jilid 2. Jakarta: Grasindo, 2003. Hal.21 [↑](#footnote-ref-22)
22. Sukawarsini Djelantik. *Prinsip Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011. Hal. 69 [↑](#footnote-ref-23)
23. Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Ibid. Hal. 121. [↑](#footnote-ref-24)
24. Anonim. Absolute And Comparative Advantage, *International Encyclopedia Of The Social Sciences 2nd Edition*. 2009, hal.3 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid. Hal. 6 [↑](#footnote-ref-26)
26. Reinhard Schumacher . Adam Smith’s Theory of Absolute advantage and the Use of Doxography in the History of Economics, *Erasmus Journal for Philosophy and Economics,*2012, Vol. 8, hal. 62 [↑](#footnote-ref-27)
27. Saptana, Sumaryanto dan Supena Friyatno. “analisis keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas kentang dan kubis di wonosobo jawa tengah”, Bogor, *PusatPenelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 2012, hal.3. [↑](#footnote-ref-28)
28. Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta: Erlangga. 2009. Seri Revisi II. Edisi Kedua, hal. 4 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid. Hal. 4-5. [↑](#footnote-ref-30)
30. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan [↑](#footnote-ref-31)